



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 005/09012009
HARI : JUMAT
TANGGAL : 9 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Agresi Militer : Militan Lebanon Serang Israel	3
	KTT ASEAN Dipindahkan ke Hua Hin	4
	Indonesia Sambut Baik Resolusi DK PBB	4
	Israel Diserang dari Lebanon	5
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Wewenang Dipangkas, BNP2TKI Surati Presiden	6
	B. EKONOMI	
	President Yudhoyono to open Indogas confab and exhibition	6
	Pengurangan Kemiskinan Terbaik Sejak 1997	7
	Bursa Saham Asia Berjatuhan	7
	'Debt Swap' RI-Italia Berpotensi Hapus Utang Indonesia	8
	Presiden Minta Pengusaha Adil Soal Penurunan Harga	8
	C. SOSBUD	
	Batik Mulai Dijadikan Cenderamata Wisatawan	9
	D. HANKAM	

		Keterlibatan Asing Tak Perlu di Aceh	10
	E.	HUKUM	
		KPK to investigate unofficial accounts in six government institutions	11
	F.	OLAHRAGA: Tidak Ada	
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Elephant problem solvable only if illefal logging stopped	11
	III.	ARTIKEL	
		Perang dan Perspektif HAM	12
		Menghormati Rakyat, Meningkatkan Kualitas Demokrasi	13
	IV.	LAIN-LAIN	
		Diundang Obama, Lia Soetoro Bawa Boneka Kenangan	15
	V.	EDITORIAL	
		Setelah BI Menurunkan Suku Bunga	16

Jakarta, 9 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Agresi Militer: Militan Lebanon Serang Israel

Militan Lebanon menembakkan sedikitnya tiga roket ke wilayah Israel utara, Kamis. Serangan ini mengancam terbukanya dua front perang melawan negara Yahudi itu yang kini tengah melakukan agresi militer di Jalur Gaza. Militan Hamas sendiri secara simultan terus menembakkan roket ke wilayah Israel selatan.

Tidak ada laporan mengenai korban dalam serangan roket itu. Namun, serangan ini menguak lagi permusuhan dengan kelompok Hizbullah, yang 2,5 tahun lalu berperang melawan Israel selama 34 hari. Hizbullah memulai perang melawan Israel pada 2006 saat militan Palestina di Gaza digempur militer Israel.

Beberapa saat setelah roket jatuh di sekitar kota Nahariya, lima mil sebelah selatan perbatasan Lebanon, stasiun TV Lebanon melaporkan mortir Israel langsung balas menembak ke wilayah Lebanon selatan.

Militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan balasan yang tepat. "Kita akan ikuti apa yang terjadi di utara. Kami siap dan akan membalas seperlunya," kata Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak.

Di Beirut, Perdana Menteri Lebanon Fuad Saniora mengutuk serangan roket ke Israel dan juga balasan yang dilakukan Israel. Pemerintah Lebanon, kata dia, akan berusaha mencari siapa pelaku penembakan roket itu dan mendorong terjadinya perdamaian.

Sejauh ini tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket dari Lebanon. Namun, pejabat pertahanan Israel yakin bahwa serangan itu dilakukan oleh Hizbullah sebagai solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina.

Namun, Menteri Penerangan Lebanon Tareq Mitri, seperti dikutip Al-Jazeera, menyatakan Hizbullah tidak terlibat dalam serangan roket tersebut. "Hizbullah telah menyatakan kepada parlemen Lebanon bahwa mereka tidak terlibat," katanya menegaskan.

Bahkan penasihat PM Saniora, Arief Al-Abed, mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa Saniora telah melakukan kontak intensif dengan para pemimpin Lebanon, termasuk Komandan Kedua Hizbullah Sheikh Naim Qassem, dan semua pemimpin tersebut menyatakan berkomitmen kepada resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Resolusi DK PBB 1701 telah mengakhiri pertempuran 34 hari antara Hizbullah dan Israel pada 2006, dan melarang agresi apa pun dari sisi mana pun terhadap pihak lain.

Al-Abed mengatakan, Saniora meminta Komandan Pasukan Perdamaian sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) di bagian selatan Lebanon untuk mengadakan penyelidikan atas serangan roket tersebut.

Saniora menyatakan Pemerintah Lebanon menolak serangan apa pun yang dilancarkan dari bagian selatan Lebanon, juga menolak pelanggaran resolusi DK PBB 1701. "Terdapat kesepakatan secara bulat di Lebanon untuk menolak pelanggaran terhadap resolusi DK PBB 1701," kata Al-Abed.

Sebelumnya, Israel mengerahkan 20 pesawat tempur untuk menggempur Kota Gaza pada Kamis pagi. Seorang tewas dan 10 lainnya terluka. Bentrokan senjata juga terjadi antara pasukan darat Israel dan militan Hamas di Gaza selatan.

Meskipun pertempuran semakin meluas, upaya diplomatik mencapai kemajuan setelah Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan dukungannya atas usulan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Prancis dan Mesir.

Dewan Keamanan PBB sendiri kembali gagal mencapai kesepakatan mengenai resolusi gencatan senjata. Namun, Dubes Mesir untuk PBB, Maged Abdelaziz, mengatakan bahwa wakil Israel, Hamas, dan Otoritas Palestina setuju untuk bertemu secara terpisah dengan pejabat Mesir di Kairo.

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengumumkan, baik Israel maupun Otoritas Palestina setuju menerima kesepakatan gencatan senjata, namun dia belum memperoleh kepastian dari Hamas. Belakangan seorang pejabat Israel menyatakan bahwa pengumuman Sarkozy itu tidak benar.

Jumlah korban tewas akibat serangan Israel selama 13 hari ke Gaza mencapai 688 orang. Ini berdasarkan laporan pejabat kesehatan Palestina. Di pihak Israel, tujuh tentara dinyatakan tewas sejak perang dimulai.

Ribuan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka, setelah tempat pengungsian di sekolah PBB digempur rudal Israel. "Kami semua ketakutan," kata Fida Kishta, salah seorang penduduk Gaza.

Di Jenewa, Palang Merah Internasional melaporkan bahwa pihaknya menemukan empat anak kecil hidup di samping mayat ibunya di balik reruntuhan rumah di Gaza, yang dihancurkan oleh militer Israel. Kelompok bantuan non-partisan yang diterjunkan ke wilayah itu menyatakan 15 orang tewas akibat gempuran Israel tersebut. (Suara Karya)

2. KTT ASEAN Dipindahkan ke Hua Hin

Pemerintah Thailand memutuskan untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pada 27 Februari—1 Maret di Hua Hin, sebuah tempat peristirahatan yang terletak 200 kilometer barat daya Bangkok, Rabu (7/1). Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara ASEAN sebelumnya direncanakan diselenggarakan di Bangkok. Demikian kabar yang dilansir media massa Thailand, Kamis.

Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan, alasan pemindahan itu adalah karena ancaman demonstran antipemerintah yang ingin mengacaukan KTT. Karena itu dia memindahkannya ke Hua Hin "untuk menjaga citra".

"Akan lebih mudah bagi badan-badan terkait untuk menjaga keamanan di Hua Hin," katanya seperti dikutip situs berita The Nation. Abhisit mengatakan, KTT tersebut hanya diselenggarakan untuk 10 pemimpin ASEAN, sementara pertemuan dengan mitra dialog, termasuk KTT Asia Timur, akan diselenggarakan pada bulan April.

Pemerintah memutuskan untuk memisahkan pertemuan menjadi dua karena salah satu mitra dialog ASEAN, yakni China, masih sibuk mengurus Kongres Rakyat Nasional akhir bulan depan. Selain China, negara-negara mitra dialog ASEAN lainnya antara lain Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru.

Tanggal dan tempat pertemuan diubah lebih dari satu kali, akibat krisis politik dan jadwal ketat para kepala negara. KTT seharusnya diselenggarakan 15 Desember lalu, bertepatan dengan berlakunya Piagam ASEAN, namun terpaksa ditunda karena demonstrasi Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) menduduki Bandara Internasional Suvarnabhumi dan Don Muang sejak November.

Saat ini, gerakan antipemerintah, Aliansi Demokratik melawan Kediktatoran (UDD atau DAAD), mengancam untuk menggunakan taktik sama untuk mengacaukan KTT ASEAN. DAAD, yang dikenal dengan kaos merah (PAD kaos kuning-red) menyatakan akan mengikuti pertemuan di Hua Hin.

Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban menginstruksikan kepala polisi Jenderal Patcharawat Wongsuwan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan. Para pejabat dari anggota ASEAN mengeluhkan tempat pertemuan yang jauh dari Ibu Kota. Para pemimpin harus melalui jalan darat, karena lapangan udara tidak bisa mengakomodasi pesawat besar.

Menurut Bangkok Post, sembilan anggota ASEAN menyetujui perubahan tersebut. Mereka memahami situasi di Thailand. Namun negara-negara mitra dialog menyetujui penundaan tersebut karena mereka menantikan pertemuan dengan ASEAN. (Sinar Harapan)

3. Indonesia Sambut Baik Resolusi DK PBB

Pemerintah Indonesia menyambut baik Resolusi No 1860/2009 tentang serangan militer Israel ke Jalur Gaza yang disahkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Jumat pagi, 9 Januari 2009, kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.

Pemerintah Indonesia menyambut baik resolusi tersebut karena dari segi prosedur, DK PBB berhasil mengadakan sidang secara formal dan mengesahkan resolusi tersebut setelah sidang sebelumnya diselenggarakan secara informal dan tidak menghasilkan resolusi, kata Menlu, di Jakarta, Jumat.

"Dari segi substansi resolusi yang mengutamakan gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan kita sambut baik, tetapi kita harapkan Resolusi DK tersebut bisa lebih keras dan bersifat memaksa," katanya.

Menurut menteri, sebagian dari masalah yang ingin dicakup tidak cukup tegas diputuskan oleh Dewan Keamanan, oleh karena itu diserahkan kepada inisiatif beberapa negara atau kawasan.

Hassan Wirajuda memberi contoh proses yang tengah berlangsung atas inisiatif Mesir di Prancis untuk bernegosiasi dengan Israel.

Menteri juga mengatakan, usul Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan darurat khusus Majelis Umum PBB dihargai oleh negara-negara Arab sebab usulan tersebut berpengaruh positif yang memaksa Dewan Keamanan bersidang dan mengesahkan resolusi tersebut. (Media Indonesia)

4. Israel Diserang dari Lebanon

Seorang wanita Palestina berdiri di depan tiga tentara Israel sambil melambaikan bendera saat mengikuti demonstrasi di Desa Bilin, dekat Ramallah, Tepi Barat, kemarin. Demonstran menentang penyerangan Israel ke Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih 600 orang.

Potensi meluasnya konflik di Jalur Gaza semakin besar setelah tiga roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah utara Israel, Nahariya, kemarin.

Pejuang Hamas dan Hezbollah menyangkal telah menembakkan roket dari Lebanon yang mengakibatkan dua warga Israel terluka ringan. Israel kemudian membalas serangan roket dari Lebanon itu dengan menembakkan altileri ke arah asal roket diluncurkan. Pemerintah Lebanon menyerukan penyelidikan atas penembakan roket itu.

"Lebanon menyangkal dan mengecam penembakan roket dan aksi pembalasan serta yakin bahwa tindakan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1701. Kami telah meminta pejabat berwenang untuk menyelidikinya," tandas pejabat Pemerintah Lebanon.

Lebanon menegaskan berkomitmen dengan gencatan senjata yang mengakhiri perang antara pejuang Hezbollah dan Israel pada 2006. "Hezbollah menjamin bahwa mereka tetap berkomitmen untuk stabilitas dan ungkapan itu juga berarti bahwa mereka tidak terlibat," ujar Menteri Informasi Israel Tarek Mitri. Setelah serangan roket pertama dari Lebanon, sirine tanda bahaya kembali berbunyi di Israel. Militer Israel kemudian menyatakan sirine tersebut merupakan "alarm salah" karena terjadi kerusakan sirine.

Penembakan roket dari Lebanon itu terjadi bersamaan dengan aksi jet-jet tempur Israel yang menggempur ratusan terowongan di wilayah perbatasan Palestina dan Mesir. Hingga kemarin, 704 warga Palestina tewas akibat gempuran mesin-mesin perang Israel. "Tank-tank Israel juga memasuki wilayah selatan Gaza," kata sejumlah saksi mata. Pesawat-pesawat Israel kembali menjatuhkan puluhan ribu selebaran di dekat perbatasan Rafah yang berisi peringatan agar warga meninggalkan rumah-rumah mereka atau menghadapi serangan Israel.

Di wilayah Rafah ada lebih dari 500 terowongan yang digunakan untuk memasukkan bahan makanan dari Mesir ke Gaza akibat blokade pangan. Israel menuduh terowongan itu juga digunakan untuk menyelundupkan senjata bagi pejuang Hamas. Pada hari ke-13 gempuran militer Israel di Gaza, kemarin, pasukan Zionis terus melancarkan serangan udara di wilayah utara Gaza yang padat penduduk. Serangan itu menghancurkan sebuah masjid di Gaza City dan bangunan di sekitarnya. Jumlah korban tewas dan terluka akibat serangan Israel itu terus bertambah.

"Ada lebih dari 704 orang yang tewas dan lebih dari 3.100 orang terluka sejak Israel melancarkan Operation Cast Lead pada 27 Desember," ujar petugas paramedis di Gaza. Kemarin, pejuang Hamas menembakkan lebih dari tiga roket ke wilayah selatan Israel dari Gaza. Meski demikian, militer Israel menyatakan akan menghentikan serangan bom selama tiga

jam, dari pukul 13.00–16.00 waktu setempat kemarin. Penghentian serangan itu untuk memberi kesempatan bantuan masuk ke wilayah Gaza.

Hamas menegaskan bahwa pejuang Palestina tidak akan menembakkan roket ke Israel jika militer Yahudi menghentikan serangan bom di Gaza. "Saya tidak berharap ada roket yang akan diluncurkan selama periode tiga jam," kata Mussa Abu Marzuk, salah satu pemimpin senior Hamas di Damaskus. (AFP/Rtr/syarifudin) (Sindo)

II. NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Wewenang Dipangkas, BNP2TKI Surati Presiden

Wewenang badan yang dia pimpin dipangkas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat langsung bereaksi.

Dia mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah tersebut. "Intinya saya melaporkan Depnakertrans karena telah mengudeta tugas saya. Saya harus seperti ini karena saya anak buah Presiden," katanya ketika dihubungi SINDO kemarin. Sebelumnya diberitakan, Depnakertrans merevisi Peraturan Menteri (Permen) No 18/2007 melalui Permen No 22/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Lalu diikuti juga penerbitan Permen No 23/2008 tentang Asuransi TKI. Dampak dari revisi ini adalah wewenang BNP2TKI dalam mengawasi pelaksanaan penempatan TKI ke mancanegara berkurang. Penerbitan dua permen itu akan berdampak pada pengalihan sejumlah pelayanan administrasi yang sebelumnya menjadi wewenang BNP2TKI.

Di antaranya tentang surat izin pengerahan, penyelenggaraan pembekalan akhir penempatan (PAP), pembuatan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), sistem komunikasi KTKLN, rekomendasi fiskal, pengawasan lembaga pelatihan, klinik pemeriksaan kesehatan, sertifikasi, asuransi, dan pengelolaan terminal khusus TKI. Kondisi itu menjadikan wewenang BNP2TKI hanya menempatkan tenaga kerja sesuai perjanjian negara asal dan negara tujuan (G to G).

Selanjutnya Depnakertrans akan mengalihkan sejumlah pelayanan administrasi TKI ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jumhur menegaskan, penerbitan dua permen tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang mengamanatkan 95% tugas penempatan dan perlindungan TKI kepada BNP2TKI dan sisanya 5% oleh Depnakertrans.

"Saya sudah berkonsultasi dengan cendekiawan, kaum intelektual dan ahli hukum soal isi UU itu memang mengamanatkan seluruh penempatan dan perlindungan TKI kepada BNP2TKI," tegasnya. Dia mengatakan, menempatkan tenaga kerja secara G to G hanya salah satu tugas BNP2TKI. "Di struktur badan kita memiliki 1 kepala badan, 4 deputi, dan 17 pejabat setara eselon dua. Jadi, kalau hanya satu yang bekerja, yang lain jadi pengangguran dong," tutur Jumhur.

Permen tersebut, menurutnya, juga melangkahi Peraturan Presiden (Perpres) No 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI, Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, serta UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, dalam UU APBN telah dikucurkan anggaran bagi BNP2TKI sebesar Rp262 miliar.

"Kalau hanya mengurus TKI melalui G to G, saya rasa cukup dengan uang Rp5 miliar saja," kata Jumhur. Sementara dalam Inpres No 6 Tahun 2006, BNP2TKI mendapat 19 butir dari 27 butir amanat tentang perbaikan reformasi sistem TKI. "Bagaimana mungkin bisa menjalankan ke-19 butir tersebut kalau ada permen itu," terangnya.

Dia meminta Presiden segera merespons permasalahan ini sehingga memberi kepastian wewenang dan tugas antara Depnakertrans dan BNP2TKI. (Sindo)

B. EKONOMI :

1. President Yudhoyono to open Indogas confab and exhibition

President Susilo Bambang Yudhoyono was scheduled to open the fourth Indogas (Indonesian gas) conference and exhibition in Jakarta on December 20, 2009.

Chairman of Indogas Committee lin Arifin Takhyan said here on Thursday a number of gas development contracts would be signed during the event.

"At present, there were 30 contracts waiting to be signed. We continue making an inventory of contracts to be signed in the last minutes," he said.

lin who is also Vice President Director of PT. Pertamina said the event which will last for four days from Jan 19 till 22 will be attended by Vice President Yusuf Kalla, Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro and Finance Minister Sri Mulyani.

In addition to the signing of contracts, other Indogas programs include a business meeting, conference and exhibition. (Antara)

2. Pengurangan Kemiskinan Terbaik Sejak 1997

Program Bantuan Langsung Tunai hanya disalurkan sampai Februari 2009 dan akan diganti program lain.

PENCAPAIAN program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan pemerintah sepanjang 2008 merupakan yang terbaik sejak 1997. Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan sehingga tinggal 37,17 juta jiwa.

"Ini yang terbaik dari 1997. Waktu itu jumlah penduduk miskin mencapai 34,96 juta," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dalam konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kementerian Kesejahteraan Rakyat sepanjang 2008 di Jakarta kemarin (8/1).

Ia menargetkan, tahun 2009 angka kemiskinan dapat diturunkan lagi menjadi 31 juta atau 14 persen dari jumlah penduduk.

Sedangkan jumlah pengangguran tahun 2008 sebanyak 9,43 juta jiwa, turun dibanding tahun 2007 sebesar 10,55 juta jiwa. Target angka pengangguran 2009 sebesar 7 juta jiwa, kata dia.

"Program pemerintah seperti beras miskin, Bantuan Tunai Langsung, PNPM Mandiri telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 7 persen. Sedangkan angka pengangguran turun 5,1 persen," kata Ical, panggilan Aburizal.

Untuk program beras miskin tahun depan, Kementerian Kesejahteraan Rakyat akan mengalokasikan dana Rp12,9 triliun, naik dibanding anggaran 2008 sebesar Rp11,66 triliun. Anggaran untuk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri tahun 2009 sebesar Rp11,01 triliun, naik dibanding tahun 2008 yang sebesar Rp4,40 triliun.

"Diharapkan PNPM Mandiri bisa membuka lapangan kerja jauh lebih besar. Sebab, tahun 2008 program ini mampu membuka lapangan kerja 41,3 juta orang," kata Ical.

BLT Dihapus

Pemerintah akan menyalurkan BLT tahun 2009 hanya untuk dua bulan yakni Januari dan Februari, kemudian menghentikannya. "Kami arahkan untuk program lain yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat," kata Aburizal.

Menurut dia, alokasi penyaluran BLT adalah 19.020.763 rumah tangga sasaran dan realisasi penyaluran sampai 5 Januari 2009 sebanyak 18.759.129 rumah tangga sasaran dengan total dana Rp12,028 triliun. "Jadi daya serapnya mencapai 98,62%," katanya.

Jumlah penerima beras rakyat miskin (raskin) tahun 2009 ditetapkan hanya 17.094.996 rumah tangga sasaran, turun dari ekpektasi sebelumnya yang mencapai 18,5 juta rumah tangga.

Raskin akan dibagikan dengan alokasi 12 bulan mencakup harga Rp1.600 per kilogram di titik distribusi dan setiap rumah tangga sasaran berhak mendapatkan 15 kilogram per bulan.

Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat (Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat) Adang Setiana, jumlah rumah tangga sasaran berkurang karena menggunakan data terbaru Badan Pusat Statistik per 30 Desember 2008 yang menyebutkan jumlah masyarakat yang layak menerima raskin memang berkurang. (Jurnal Nasional)

3. Bursa Saham Asia Berjatuh

Bursa saham Asia berjatuh yang dipimpin oleh kejatuhan saham-saham perusahaan otomotif dan teknologi saat terjadi pemecatan karyawan dan terpangkasnya keuntungan akibat kekhawatiran resesi ekonomi yang mendalam.

Saham Toyota Motor Corp. anjlok 3,2 persen. Nissan Motor Co. turun 5,3 persen pasca mengistirahatkan para pegawainya di Inggris. Asustek Computer Inc. tergelincir 7 persen di Taiwan pasca perkiraan kerugian per kuartal. Samsung Electronics Co. tergelincir 3 persent

setelah Bank of Korea memotong suku bunga dan mengatakan perekonomian akan memburuk "dengan cepat".

"Saat kita memasuki musim pendapatan, tak ada berita bagus yang bisa diharapkan," kata Yoji Takeda, yang mengelola dana setara US\$ 1,1 miliar (sekitar Rp 22 triliun) di RBC Investment (Asia) Ltd. di Hong Kong. "Jumlah dan perkiraan persisnya sepertinya akan lebih buruk dari yang dibayangkan para investor."

Indeks MSCI Asia Pacific jatuh 0,8 persen menjadi 89,19 pada pukul 12.03 waktu Tokyo (pukul 11.00 WIB). Indeks ini telah mengalami kemerosotan sebesar 0,5 pada tahun ini setelah mencatat rekor penurunan 43 persen sepanjang 2008.

Indeks saham Nikkei 225 merosot 0,8 persen menjadi 8.808,04. Saham-saham Australian sedikit lebih beruntung dengan mengaut keuntungan yang dipimpin saham Newcrest Mining Ltd., setelah naiknya harga emas pada pertengahan minggu ini.

Saham-saham di Amerika Serikat umumnya naik pada Kamis kemarin dengan Indeks Standard & Poor's 500 Index naik 0,3 persen saat kejatuhan harga minyak mendorong proyeksi keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, S&P 500 Futures anjlok 0,1 persen hari ini. (Tempo Interaktif)

4. 'Debt Swap' RI-Italia Berpotensi Hapus Utang Indonesia

Program debt swap Indonesia -Italia berpotensi menghapus utang Indonesia kepada Italia hingga sekitar US\$24,2 juta dan 5,7 juta euro (sekitar Rp300 miliar).

Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Internasional, Mahendra Siregar di Jakarta, Jumat (9/1), mengatakan, program debt swap RI- Italia itu ditandatangani 9 Maret 2005 dan berlaku sampai akhir 2010.

Program konversi utang itu merupakan salah satu kontribusi Pemerintah Italia kepada Indonesia menanggulangi dampak bencana tsunami di Aceh dan Nias.

Ke dua belah pihak pada tahap pertama 2006 menyetujui pelaksanaan 4 buah proyek di NAD dan 2007 ke dua belah pihak telah menyetujui secara formal pelaksanaan proyek-proyek itu. Pemerintah Italia telah menghapus utang 1.425.329,32 euro dan US\$5.027.070,66.

"Pada tahun 2007 telah disetujui pelaksanaan enam buah proyek senilai Rp110.176.638.000 atau setara 9.316.475,37 euro," kata Mahendra.

Pelaksanaan ke enam proyek itu telah selesai pada 2008 dan laporan final proyek-proyek itu telah disampaikan kepada Pemerintah Italia untuk memperoleh persetujuan resmi mengenai pengurangan utang pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Dubes Italia untuk RI Roberto Palmieri mengatakan, program debt swap merupakan inisiatif Indonesia dan Italia hanya memberi payung saja karena semua sumber pendanaan sebenarnya tetap dari Indonesia.

"Selamat kepada BRR karena proyek sebesar Rp250 miliar yang cukup besar selesai dalam waktu sekitar 3 tahun, ini prestasi bagus dari Indonesia," kata Palmieri. (Media Indonesia)

5. Presiden Minta Pengusaha Adil Soal Penurunan Harga

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pengusaha bersikap adil dan jujur soal penurunan harga barang pokok dan tarif angkutan sebagai dampak dari penurunan harga BBM Desember lalu.

Hal itu dikatakan Menkeu/Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas Presiden dengan sejumlah menteri ekonomi dan Kadin di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

"Namun yang paling penting, Presiden menginstruksikan apabila memang komponen biaya itu turun, maka seharusnya tarif dan harga yang diberlakukan kepada masyarakat harusnya juga bisa turun. Pemerintah juga minta pengusaha adil dan fair kepada masyarakat, jangan hanya pada saat naik (harga) segera (naik), dan naiknya tidak proporsional, tetapi pada saat turun ditahan dan penurunannya sangat tidak berarti," kata Menkeu.

Menurut Menkeu, dalam pertemuan tersebut Presiden juga menekankan kepada Kadin untuk melihat secara sungguh-sungguh penurunan harga di dunia yang tentu mempengaruhi ongkos produksi dan seharusnya tercermin pada harga akhir yang berlaku di masyarakat.

Dijelaskan Menkeu, agar keinginan pemerintah itu bisa terwujud dibutuhkan suatu transparansi dan kesungguhan dari semua pihak terutama kalangan pengusaha.

Untuk itu, lanjutnya juga diperlukan suatu komunikasi antara pemerintah dan pengusaha di bawah Kadin yang akan dilakukan pada 12 Januari mendatang di Kantor Presiden.

"Ini komunikasi dua belah pihak, terutama kalau harga BBM mengalami penurunan sebagai hulunya, maka ikutan-ikutan di bawahnya juga harusnya juga tercermin bisa dirasakan masyarakat. Jadi tidak ada alasan macam-macam lagi untuk mengatakan kenapa tidak bisa turun," katanya.

Mengenai permintaan Kadin agar pemerintah kembali menurunkan harga premium dan solar sebesar Rp500, Menkeu mengatakan soal harga BBM akan dievaluasi pada tanggal 15 Januari ini.

"Kadin memang mengajukan usulan (penurunan BBM), tetapi pemerintah yang paling penting melihat perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar dan bagaimana dampak terhadap keseluruhan masyarakat secara umum, dan dari sisi tujuan ekonomi termasuk dari APBN di sisi subsidi. Kita akan pertimbangkan itu dan nanti akan disampaikan pada hari Senin keputusan harga BBM ini," katanya.

Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat dalam kesempatan itu mengatakan, apabila usulan penurunan harga BBM sebesar Rp500 disetujui, maka tarif angkutan umum dan harga sejumlah bahan pangan pokok dimungkinkan dapat turun sekitar 10 persen.

"Akan ada rapat untuk membahas atau mengumumkan (keputusan penurunan harga BBM bersubsidi) pada 12 Januari dan berlaku efektif pada 15 Januari," katanya.

Dengan adanya usulan penurunan harga BBM bersubsidi itu maka harga premium diperkirakan menjadi Rp4.500 per liter sedangkan solar Rp4.300 per liter.

Selain mengusulkan penurunan harga BBM bersubsidi, Kadin juga meminta agar stimulus ekonomi diberikan kepada PLN dalam bentuk subsidi sehingga PLN dapat menurunkan tarif listrik industri. (Antara)

C. SOSBUD :

1. Batik Mulai Dijadikan Cenderamata Wisatawan

Baju dan kain batik kini semakin sering dijadikan cenderamata oleh para wisatawan yang tengah berkunjung ke Yogyakarta.

"Sentra penjualan baju dan kain batik di Yogyakarta pada saat libur panjang akhir tahun cukup ramai wisatawan yang membeli produk kerajinan tersebut," kata Direktur Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Republik Indonesia (APIKRI), Amir Fanzuri, di Yogyakarta.

Menurut dia, Yogyakarta yang dikenal dengan produk kerajinan batik memang potensial untuk lebih mempromosikan batik kepada wisatawan, apalagi pariwisata di daerah ini juga berkembang pesat.

"Setiap musim libur sekolah atau libur nasional hampir semua sentra penjualan kain dan baju batik di Yogyakarta selalu diserbu wisatawan," ujarnya.

Ketika banyak wisatawan mancanegara datang ke Yogyakarta, mereka umumnya mencari produk batik untuk dijadikan oleh-oleh saat kembali ke negaranya.

Meski demikian, kata dia, produk batik maupun jenis kerajinan lainnya asal Yogyakarta masih perlu lebih dikenalkan kepada masyarakat melalui promosi baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Upaya mengenalkan produk kerajinan seperti itu salah satunya dengan menyelenggarakan pameran tingkat regional, nasional maupun internasional," katanya.

Dengan demikian, pada libur panjang para penjual atau pedagang batik di Yogyakarta dapat memperoleh pendapatan signifikan karena dipastikan wisatawan akan mencari produk tersebut.

Sementara itu, pengelola outlet kerajinan batik Pandak Kabupaten Bantul, Alex Syamsuri mengatakan, selama libur akhir tahun 2008 hingga awal 2009, penjualan kain maupun baju batik di outlet-nya meningkat drastis.

Selama musim libur itu, wisatawan banyak yang datang ke outlet ini baik rombongan keluarga maupun siswa sekolah. Mereka banyak memborong kain batik tulis maupun cap mulai harga Rp50.000 per potong hingga lima sampai enam juta rupiah per potong.

"Meskipun kain batik khususnya jenis tulis berbahan sutera harganya mencapai jutaan rupiah, namun tetap ada wisatawan yang membeli dalam jumlah cukup banyak," katanya.

Menurut dia, banyaknya wisatawan terutama wisatawan nusantara yang membeli bahkan memborong batik berarti mereka mulai menyadari pentingnya menggunakan produk milik bangsa sendiri. "Mereka mulai mencintai produk dalam negeri," ujarnya.

Menyinggung beredarnya batik produk China, ia mengatakan batik produk Indonesia tetap akan laku dan unggul karena motifnya sulit ditiru oleh negara lain khususnya motif batik tulis.

Ketua Paguyuban Pencinta Batik Yogyakarta, Ny Larasati Sulaintoro mengatakan, di masa datang diharapkan produk batik menjadi cenderamata wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, sehingga keberadaan warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia ini dapat dilestarikan dengan baik.

Jika batik sudah menjadi bagian pariwisata Indonesia maka diharapkan kehidupan para perajin batik di nusantara menjadi lebih baik, apalagi sektor pariwisata sudah menjadi tumpuan kehidupan sebagaimana masyarakat di negeri ini.

Jadi, kata dia, selain bisa menghidupi para perajin batik di Indonesia, upaya menjadikan batik sebagai cenderamata untuk wisatawan yang berkunjung ke objek wisata diharapkan ikut melestarikan hasil karya nenek moyang ini dari kepunahan.

"Jika produk batik menghilang dari Indonesia, maka dikhawatirkan sebagian budaya bangsa ini juga akan ikut hilang. Sangat disayangkan jika keberadaan batik punah hanya karena kurangnya kepedulian kita," katanya. (Antara)

D. HANKAM :

1. Keterlibatan Asing Tak Perlu di Aceh

KSAD berpendapat, penanganan Aceh sepenuhnya dikendalikan pemerintah daerah.

Lembaga asing tidak perlu lagi masuk dan ikut campur dalam menangani penyelesaian masalah di Aceh. "Kalau tetap ada keinginan mereka seperti itu, ya tidak boleh," kata Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo usai peresmian Balai Keterampilan Kartika di Jakarta, Kamis (8/1).

Agustadi beralasan, saat ini kondisi Aceh sudah kondusif. Tidak ada konflik yang berarti pasca ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Dengan kondisi seperti ini provinsi paling barat Indonesia itu seharusnya bisa dikendalikan pemerintah daerah.

"Cukup dalam negeri," kata lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1974 itu. Agustadi menanggapi pertemuan tertutup sejumlah petinggi GAM dengan pejabat RI di Helsinki, Finlandia. Pertemuan dua hari yang berakhir, Senin (5/1) itu membahas keamanan dan hak asasi manusia di Aceh pascakonflik yang melibatkan kedua belah pihak.

Dalam pertemuan delegasi GAM terdiri dari Mentroe Malik, Muzzakir Manaf, dan juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Ibrahim Syamsuddin. Pemerintah diwakili Menteri Negara BUMN Sofyan Djailil, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Departemen Kehakiman dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, Duta Besar RI di Finlandia Farid Husein, dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Bambang Darmono.

Pertemuan juga dihadiri Juha Christensen dan Robert dari Yayasan Institute Perdamaian Indonesia (IPI)/Interpeace dan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) Pieter Feith. "Saya lihat tidak ada urgensi pertemuan RI dan GAM itu," kata Agustadi.

Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi berpendapat pertemuan bisa diartikan masih mengakui keberadaan GAM di Aceh.

Dia mengatakan, adanya gejolak di Aceh lebih disebabkan masa transisi dari konflik yang besar. Kalaupun perlu ada evaluasi, sebaiknya mengatur sendiri keadaan di dalam negeri.

"Pemerintah harus jelaskan pertemuan tersebut," katanya. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi I (bidang pertahanan dan luar negeri) DPR Yusron Ihza Mahendra. Dia berharap, sepulang dari pertemuan delegasi pemerintah menjelaskan apa saja yang dibicarakan dan dicapai dalam pertemuan tersebut.

"Kalau ditutupi malah menimbulkan kecurigaan," kata politisi Partai Bulan Bintang itu. Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, pertemuan hanya digelar informal. Kumpul-kumpul orang yang pernah terlibat dalam perundingan.

"Tidak ada agenda pemerintah," kata Faizasyah. (Jurnal Nasional)

E. HUKUM :

1. KPK to investigate unofficial accounts in six government institutions

The Corruption Eradication Commission (KPK) has decided to investigate hundreds of unofficial accounts in six government departments or agencies, KPK's deputy for law enforcement Ade Rahardja said here on Thursday.

He said the six government departments or agencies whose unofficial accounts would be investigated were the Supreme Court, the Home Affairs Ministry, the Manpower Ministry, the Agriculture Ministry, the Ministry of Law and Human Rights Affairs and the Oil and Gas Upstream Regulating Body (BP Migas).

Based on a report by the Finance Ministry, there were 102 unofficial accounts in the Supreme Court, 36 accounts in the home affairs ministry, 21 in the manpower ministry, 32 in the agriculture ministry, 66 in the ministry of law and human rights affairs and two accounts in the BP Migas.

Ade said the KPK's plan to investigate the accounts constituted an effort to follow up the finance ministry's report on the existence of the unofficial accounts.

He said the KPK felt it was necessary to look into the form, use and identities of the users of the accounts that were not officially listed and had remained unreported.

"The KPK will be investigating the matter," Ade Rahardja said.

According to Ade, the finance ministry actually had also asked for KPK's assistance to investigate the existence of unofficial accounts in the Ministry of Social Affairs. But the social affairs ministry had clarified the matter so that an investigation was no longer needed.

Ade hoped that the six government institutions would adopt a cooperative attitude so that the efforts to put the accounts in order would run smoothly.

Separately, the Finance Ministry's Inspector General, Hekinus Manao, had said he hoped the KPK would report all its findings soon after the investigations.

"The government wants the KPK to submit a report on it in March at the latest," Hekinus Manao said.

He said the ministry of finance would soon invite a KPK team to carry out coordination and exchange data.

According to Hekinus, the KPK had set up a special team which is divided into several sub-divisions to trace the accounts.(ANTARA)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Elephant problem solvable only if illegal logging stopped

Wild elephant incursions into human settlements in Aceh will continue if nothing is done to stop illegal logging in forest areas, a local nature conservation official said.

"The problem will persist unless illegal logging is stopped," Andi Basrul, head of the Nanggroe Aceh Darussalam Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), said here Saturday.

During December 2008, wild elephants had invaded a number of villages in Aceh, damaged a few houses and injured several people.

Basrul said his agency could not do much to stop the animals' incursions because they were merely reacting to the damage being done to their habitat.

Villagers were known to have tried to fight the elephants by poisoning them but Basrul said the villagers' actions would not be effective and only cause the elephant population to shrink.

The root cause of the present conflict between elephants and humans was the damage done to the animals' habitats by illegal logging, he said.

The wild elephant problem existed in the districts of Aceh Jaya, South Aceh and North Aceh, he said.

The only way to solve the problem, according to Basrul, was the consistent implementation of the Aceh provincial government's moratorium on forest logging. (ANTARA)

III. ARTIKEL :

1. Perang dan Perspektif HAM oleh Todung Mulya Lubis

Tak ada yang tahu kapan perang Israel-Palestina akan berakhir. Kenyataan yang terjadi adalah gencatan senjata, pelanggaran gencatan senjata, perang lagi, gencatan senjata, perang lagi, dan seterusnya.

Tak ada titik-titik terang perang akan berakhir. Perang sekarang ini juga akan berujung pada gencatan senjata yang siap dilanggar lagi. Sampai kapan?

Melanggar HAM

Sejarah panjang konflik Israel-Palestina (atau Arab secara keseluruhan) bisa ditulis dan diperdebatkan, dan akan banyak perspektif yang bertentangan. Ada yang melihatnya dari segi agama, ekonomi, atau politik. Saya tak ingin terlibat debat tentang asal muasal konflik itu. Saya ingin melihat perang Israel-Palestina dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) di mana secara tegas dapat disimpulkan, perang Israel-Palestina secara terang-terangan telah melanggar HAM dan secara spesifik bisa dikategorikan sebagai setidaknya kejahatan perang (war crime) dan kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity).

Statuta Roma yang sudah efektif sebagai hukum internasional (enforceable) secara terinci bisa dibaca dan disarikan untuk bisa memahami mengapa telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam hukum internasional, hukum perang (laws of war) diatur amat rinci, baik yang berasal dari hukum kebiasaan (customary laws) maupun traktat dan kovenan. Semua hukum perang yang berlaku mensyaratkan agar dalam perang semua tindakan (ius in bello) tunduk pada hukum perang di mana penduduk sipil dan tempat-tempat publik tak boleh diserang.

Alasan untuk perang (ius ad bellum) juga mensyaratkan, suatu perang tak bisa karena semata-mata ingin berperang. Di sinilah ius in bello dan ius ad bellum berhubungan satu sama lain dan membatasi perang itu sebagai self defense dan atau respons terhadap tindakan permusuhan (conduct of hostilities).

Prinsip yang mengikat

Di sini ada beberapa prinsip yang mengikat, yaitu prinsip proporsionalitas dan nesesitas (necessity). Artinya, perang tak boleh membabi buta, dia harus seperlunya, sebagai bagian self defense atau respons terhadap conduct of hostilities.

Jika ditelisik lebih jauh, akan ditemukan dua persyaratan penting dari semua itu, yaitu persyaratan kemanusiaan dan diskriminasi. Humanitas dalam arti harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan diskriminasi dalam arti harus menyerang tentara (combattans), bukan sipil, apalagi orangtua, perempuan, dan anak-anak. Tak boleh pula menyerang rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum lain. Yang boleh diserang adalah pangkalan militer, gudang senjata, dan yang terkait dengan itu.

Israel bisa berdalih Hamas yang memulai dengan mengakhiri gencatan senjata dan menembakkan rudal ke Israel. Seandainya ini yang menjadi asal serangan Israel ke Gaza, pertanyaannya adalah apakah Israel melakukan perang terhadap Palestina secara proporsional dalam konteks self defense atau respons terhadap conduct of hostilities.

Tayangan CNN menggambarkan reruntuhan banyak rumah publik, termasuk rumah ibadah, dan masyarakat sipil yang terbunuh dan luka-luka. Seorang ibu, seperti ditayangkan CNN, menangis karena anaknya tewas tertembak tanpa ada pertolongan. Ibu-ibu Palestina berteriak kepada pemimpin Hamas untuk bertindak menyelamatkan anak-anak tak berdosa yang mati dan luka tanpa pertolongan.

Tayangan CNN ini menunjukkan, Israel sudah melampaui self defense dan respons terhadap conduct of hostilities di luar batas proporsionalitas. Dengan jumlah korban meninggal lebih dari 500 orang serta ribuan orang terluka serta hancurnya rumah-rumah penduduk, kiranya Israel bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan perang, sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perlu dicatat, Israel dengan persenjataan superior, berperang melawan Hamas yang persenjataannya kalah jauh. Jadi, serangan Israel adalah terencana, sistematis, dan meluas (massive).

Tindakan PBB

Serangan Israel terhadap Palestina bisa disebut pelanggaran terhadap The Hague Conventions dan The Geneva Conventions sejauh terkait conduct of war dan serangan terhadap warga sipil. Serangan Israel juga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Statuta Roma.

Pertanyaannya, mengapa dunia tak berdaya? Mengapa Dewan Keamanan PBB tak bisa menghentikan perang yang membunuh banyak warga sipil?

Dari perspektif HAM, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama oleh PBB yang menurut Piagam PBB bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Untuk itu PBB wajib melakukan semua tindakan yang menghentikan semua ancaman keamanan dan perdamaian. PBB tidak melakukan hal ini atau belum melakukan hal ini.

Kedua, yang disebut humanitarian intervention bisa dilakukan untuk membantu korban warga sipil tak berdosa. Ini belum dilakukan. Kewajiban internasional yang disebut responsibility to protect pernah dilakukan di Bosnia, Rwanda, tetapi terlambat. Saya khawatir, pelaksanaan kewajiban internasional ini juga akan terlambat.

Berapa banyak lagi orangtua, perempuan, dan anak-anak yang harus mati dan luka-luka tertembak? Berapa banyak bangunan sipil yang bakal dihancurkan? Berapa lama lagi dendam kesumat dan permusuhan ini dipertahankan?

2. Menghormati Rakyat, Meningkatkan Kualitas Demokrasi oleh Victor Silaen

Pasca-Soeharto, kian banyak orang yang bertanya: apa manfaat demokratisasi yang bergulir deras hingga kini? Kalau jawaban yang diharapkan atas pertanyaan itu kesejahteraan material yang makin bertambah (aspek ekonomi) seiring waktu, jelas bukanlah demokrasi yang harus ditingkatkan kualitasnya.

Sebab, bisa saja sistem ekonomi mengalami kemajuan terusmenerus tanpa disertai sistem politik yang semakin modernis—seperti halnya Brunei Darussalam, Singapura, dan beberapa negara lain. Di era Soeharto pun, dengan sistem politik yang dikelola secara otoritarian, kondisi ekonomi Indonesia dapat mengalami kemajuan pesat sejak dekade 1970-an—meski akhirnya dilanda krisis juga.

Atau sebaliknya, India yang telah demokratis sejak dulu, perekonomiannya tetap begitu-begitu saja. Jadi, orang banyak yang bertanya tentang manfaat demokrasi itu mestinya memahami bahwa demokratisasi yang bergulir deras pasca-Soeharto bukanlah demi meningkatkan kesejahteraan material, melainkan demi menghormati rakyat selaku pemegang kedaulatan di negara republik ini. Jika di era Orde Baru selama puluhan tahun itu rakyat selalu ditakut-takuti demi menciptakan kepatuhan kepada pemimpin, sekarang rakyat mulai dihormati karena suara mereka berdampak pada “hidupmatinya” para pemimpin itu.

Khususnya dalam ajang pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah, suara rakyat kini bagaikan vonis politik yang menimbulkan cleansing effect. Artinya, jika ada pemimpin incumbent yang tidak disukai lagi, maka rakyat pun dapat menghukumnya melalui pemilu. Maka, lembaga politik negara pun seakan mengalami pembersihan dari para politisi busuk yang tak lagi disukai itu.

Terkait itulah rakyat mestinya bergembira, karena sejak 2004 sudah dapat menikmati hak politik yang semakin dihormati dalam rangka memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang disukai dan tidak disukai. Tapi saat itu hak politik dengan kualitas yang sama belum dapat dinikmati rakyat dalam rangka memilih calon anggota legislatif (caleg) yang disukai dan tidak disukai, karena partai politiklah yang berwenang menentukannya berdasarkan nomor urut calon wakil rakyat yang bersangkutan.

Dalam Pemilu 2009 ini hak politik dalam rangka memilih caleg itu sudah sama kualitasnya dengan hak politik dalam rangka memilih capres-cawapres. Itulah kabar gembira bagi rakyat dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Berdasarkan itu, untuk periode 2009–2014, siapa yang akan menjadi wakil rakyat tidak lagi ditentukan oleh partai politik berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Dengan begitu, kedaulatan rakyat semakin diakui. Rakyat yang memilih, rakyat pula yang menentukan. Bukankah karena itu demokrasi Indonesia kelak semakin berkualitas? Tak mengherankan jika putusan itu disebut sebagai kemenangan rakyat Indonesia pada Pemilu 2009.

Kita bisa menyebut putusan MK ini sebagai kemenangan demokrasi. Mengapa demikian? Pertama, karena berdasarkan putusan itu setiap caleg memiliki posisi yang setara. Jika sebelumnya ada sebagian caleg yang merasa memiliki keistimewaan politik karena kedekatannya dengan pengurus teras partai, atau para caleg itu sendiri memang memiliki jabatan penting di partai, sekarang semua caleg sama karena yang penting adalah suara rakyat untuk mereka.

Kedua, jauh sebelum ini memang ada beberapa partai yang sudah mendeklarasikan bahwa mereka menerapkan mekanisme suara terbanyak dalam menempatkan para caleg di lembaga legislatif. Namun, bukankah itu hanya ketetapan internal partai yang tidak didukung landasan hukum yang kuat-mengikat seperti halnya undang-undang? Maka, dengan keluarnya putusan terbaru MK itu potensi trik-intrik yang mungkin saja dilakukan partai itu pun menjadi pupus dengan sendirinya. Ketiga, bukan rahasia lagi bahwa di beberapa partai telah terjadi praktik jual beli nomor urut caleg.

Artinya, caleg yang ingin dapat “nomor jadi”, wajib hukumnya untuk menyetor uang sejumlah sekian-sekian. Itu sebabnya, caleg yang tidak mampu menyetor uang sejumlah itu dengan sendirinya mendapatkan “nomor sepatu” alias kecil kemungkinan akan dapat kursi. Sekarang, dengan keluarnya putusan terbaru MK itu, para caleg yang sudah telanjur menyetor uang politik itu pun gigit jari. Setoran mereka kelak tidak ada pengaruhnya bagi perolehan kursi di parlemen.

Baik menyetor atau tidak, yang menentukan kelak adalah suara rakyat. Keempat, dengan disahkannya ketentuan mekanisme suara terbanyak ini, para wakil rakyat periode 2009–2014 niscaya belajar untuk lebih loyal kepada konstituennya ketimbang kepada partainya. Pada periode 2004–2009 yang masih berjalan ini kita sulit memastikan apakah wakil rakyat yang duduk di parlemen mendapatkan kursi karena terpilih dengan suara terbanyak atau karena partainya yang merekayasa sedemikian rupa sehingga meski perolehan suaranya sedikit tapi mereka berhasil meraih kursi.

Kelima, ke depan proses politik Indonesia akan semakin berkontribusi pada terbentuknya nilai budaya kompetisi di masyarakat. Artinya, siapa yang sungguh-sungguh berakar di masyarakat selama ini, niscaya merekalah yang berhasil meraih simpati rakyat. Di sinilah para politisi harus berkompetisi. Memang, di satu sisi kompetisi niscaya rawan konflik. Namun, jika ia disikapi dengan positif dan dikelola dengan baik, niscaya dampaknya semakin menumbuhkan kebutuhan untuk berprestasi pada diri setiap orang.

Bukankah ini pun niscaya menjadi nilai budaya yang positif di tengah kehidupan masyarakat Indonesia? Akhirnya, bagi mereka yang selama ini berpikir akan golput pada hari “H” 9 April 2009, kinilah saatnya untuk berpikir ulang. Sebab, setiap suara kini betul-betul dihargai. Suar-suara rakyat kini dapat menjadi sarana pembersih bagi para politisi incumbent yang tidak disukai lagi maupun para caleg yang tidak berintegritas-berkualitas. Namun ingat, cerdaslah dalam memilih nanti.

Persiapkanlah diri mulai sekarang dengan memiliki daftar nama para caleg itu, dan lalu mencermati rekam-jejak mereka, untuk kemudian menyeleksi siapa-siapa saja yang layak dipilih. Pendeknya, jangan sampai masuk ke tempat pemungutan suara (TPS) nanti dengan “kepala kosong” atau memilih caleg hanya gara-gara sosoknya yang terkenal. (SINDO)

IV. LAIN-LAIN

:

1. Diundang Obama, Lia Soetoro Bawa Boneka Kenangan

Terkejut, haru, sedih, dan bangga. Perasaan itu kini berkecamuk dalam benak Lia Soetoro, 51, kakak angkat Barack Hussein Obama, presiden terpilih Amerika Serikat (AS). Setelah puluhan tahun berpisah, keduanya direncanakan bertemu kembali dalam suasana dan kesempatan yang berbeda.

Jika tidak ada kendala, Lia akan menghadiri pelantikan Barack Obama sebagai Presiden AS di Washington DC, 20 Januari mendatang atas undangan khusus dari saudara angkatnya itu. Jika Barry, sapaan kecil Barack Obama, kini menjadi orang nomor satu di AS, Lia masih tetap tinggal di kampung.

Selain sebagai ibu rumah tangga, istri Ibnu Sobah, 58, ini juga punya kesibukan sehari-hari mencari rumput untuk kambing yang dia pelihara di Desa Sukasirna, Kampung Babakan Banten, RT 03 RW 09, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemui di rumah kontrakan anaknya, Ibnu Syaifudin di Jalan Keselamatan Ujung RT007/02 No 9 Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin, Lia tampak bersahaja.

Wanita kelahiran 17 Agustus 1957 ini sesekali senyumnya tersungging ketika menerima kehadiran SINDO. Ibu dari tiga anak bernama Heni Marlina, 27, Noni Nova, 25, dan Syaifudin ini kemudian memulai pembicaraan. Menurut Lia, sejak Obama terpilih sebagai presiden AS, dirinya telah mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan adik angkatnya itu. Undangan berawal ketika utusan yang mengaku dekat dengan Maya Soetoro—adik tiri Obama—menghubungi dirinya, 9 November 2008 lalu.

Saat itu, wanita berkulit putih dan berkacamata yang diketahui bernama Gelf meminta Lia menghadiri pelantikan Obama. Tidak hanya itu, Gelf juga meminta Lia mempersiapkan diri menjelang pelantikan Barry. Menurut Lia, wanita yang memiliki postur tinggi dan berambut panjang itu memberikan uang sebesar Rp600.000 untuk pembuatan akta kelahiran. "Karena saya tidak punya akta. Belum tahu untuk apa," tutur Lia. "Usai memberikan uang, dia kemudian meminta saya untuk menunggu kabar selanjutnya," jelasnya.

Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Meski demikian, Lia berharap jika pertemuan itu terjadi dia telah menyiapkan boneka monyet dan baju yang diberikan Obama kepada dirinya ketika berpisah di Bandara Internasional Hawaii, AS, pada 1971 silam se usai menjenguk neneknya Madelyn Dunham yang sakit kala itu.

Sesekali, Lia yang mengenakan jilbab hitam dan baju lengan panjang dengan motif kembang-kembang ini tampak menerawang ke langit-langit rumah. Lia pun melanjutkan ceritanya. Dua pekan lalu dia mendapat telepon yang memintanya agar menunggu, karena semuanya tengah dipersiapkan. "Hingga kini saya belum mendapat telepon atau informasi lagi," katanya. Selain barang-barang milik Barry, Lia juga berniat memberikan pesan yang hingga kini masih terpatri dalam jiwanya.

Pesan yang selalu diberikan mendingan ibu Obama, Stanley Ann Dunham ketika kami masih bersama, terutama sebelum makan dan tidur. "Pesan tersebut yakni, sebelum melihat ke atas, lihat ke bawah, ke kiri dan ke kanan termasuk ke depan dan ke belakang," kenang Lia. Pesan ini, kata dia, diberikan Ann Dunham agar Barry menjadi orang yang baik dan tidak sombong.

Mungkin, pesan ini sangat bermanfaat bagi Barry untuk lebih bijak dalam menerapkan kebijakan kepada rakyatnya, termasuk kepada semua negara di dunia. Diakui Lia, pertemuannya dengan Barry bermula ketika dia diajak kakeknya almarhum Hamim. Saat itu, dirinya ditinggal di rumah Mbok Siti, pembantu rumah tangga pasangan Lolo Soetoro-Stanley Ann Dunham di Kampung Leuwiliang, Bogor, yang ketika itu hendak ke Cibadak, Sukabumi.

Ketika itu usia Lia masih 7 tahun, lebih tua 4 tahun dibandingkan Obama yang lahir di Honolulu, Hawaii, 4 Agustus 1961. Lia kemudian diajak Siti ke Jakarta dan menetap di rumah pasangan suami istri Lolo Soetoro (ayah tiri Obama) dan Ann Dunham. Lia biasa menyapa keduanya dengan Bapak Lolo dan Ibu Eny. "Waktu itu Maya Soetoro belum lahir, sedangkan Barry masih tinggal bersama neneknya (di Hawaii)," katanya. Setelah beberapa saat tinggal bersama, Eny menjanjikan akan memberikan dirinya adik yang akan menemaninya.

"Tunggu yah, saya akan menjemput adik kamu Barry, biar ada temanmu di rumah," ujarnya menirukan ucapan Eny. Obama pun akhirnya dibawa ke Indonesia dan sempat mengenyam pendidikan dasar di Jakarta. Tak dipungkiri, selama tinggal bersama, Lia selalu menemani Barry ke manapun. Tidak hanya bermain, bahkan tidur dan mandi bersama.

Termasuk bepergian, karena keluarga Barry termasuk gemar berlibur ke tempat-tempat wisata. Beberapa kali dirinya diajak ke Puncak, Yogyakarta, Bali, hingga Tanah Toraja (Sulawesi Selatan) dan Kebun Raya Bogor. "Anak-anak saya mengajak saya ke Bogor, tapi saya sedih, karena jadi ingat masa lalu," tuturnya.

Di rumah, Lolo dan Eny memanggil Lia dengan panggilan Non yang merupakan sapaan pendek dari Nona. "Karena selalu dipanggil Non, Barry jadi memanggil saya Mbak Non," ungkapnya. Dia mengatakan, Barry kecil bertubuh bongsor dan merupakan sosok yang baik dan murah hati. Dia selalu membagi makanan atau jajanan kepada kawan-kawannya.

Mahasiswa Bandung Diundang

Alvin Adhitya Arief, 21, tak menyangka, jejaknya merantau ke negeri Paman Sam mengantarkannya menuju Gedung Putih. Wajah Alvin kini lebih sumringah. Sebab, tak lama lagi, dia akan menjadi salah satu tamu penting pelantikan Presiden AS ke-44 Barack Obama pada 20 Januari mendatang.

Undangan pelantikan yang dikirim University Presidential Inaugural Conference itu diterima Alvin sejak Februari 2008 lalu. Email yang dikirim panitia tidak lantas dibalas Alvin. Sebab, dia

harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan kedua orangtuanya. Alvin kini tercatat sebagai mahasiswa manajemen bisnis di India University di AS. Alvin menjadi bagian dari 1% mahasiswa terbaik di kampusnya bersama mahasiswa dunia lainnya.

Sumbangan Pelantikan

Walaupun krisis ekonomi melanda AS, sumbangan untuk upacara pelantikan Barack Obama terus mengalir. Hingga kemarin, jumlah sumbangan tersebut mencapai tidak kurang dari USD30 juta selama tiga minggu terakhir ini. Panitia Pelantikan Presiden (PIC) mengatakan sekitar 2.000 donor telah memberikan sumbangannya.

Nama-nama mereka juga telah diumumkan dan sedikitnya 378 donor memberikan sumbangan maksimal USD50.000 untuk perorangan. Untuk perusahaan atau lembaga, sumbangan maksimal ditetapkan USD250.000. Untuk perorangan mereka antara lain para selebriti Hollywood seperti Halle Berry, Samuel Jackson, Sharon Stone, Jammie Foxx, dan beberapa produser terkemuka seperti Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg, Robert Zemeckis, dan James Lassiter.

Selain itu, ada juga nama-nama seperti George Soros dan penyanyi legendaris Barbra Streisand. Selain selebriti, ada juga sejumlah eksekutif dan investor seperti pebisnis real estat Herb Miller yang menyumbang USD25.000, Morton Fungler sebesar USD50.000 dan Anthony Welters juga sebesar USD50.000. (SINDO)

V. EDITORIAL

:

1. Setelah BI Menurunkan Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan suku bunga BI dari 9,25 persen menjadi 8,75 persen. Suatu persentase penurunan terbesar dalam satu tahun terakhir dan diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional.

Penurunan itu, menurut Gubernur Bank Indonesia Boediono, di Jakarta, Rabu (7/1), didasarkan evaluasi kondisi ekonomi dan moneter di dalam dan luar negeri serta prospeknya pada tahun 2009. Katanya, tekanan inflasi di dalam negeri dalam beberapa bulan terakhir menurun.

Dalih pimpinan otoritas moneter tersebut masuk akal sebab Bank Indonesia selalu berharap keputusan yang diambil berpengaruh secara efektif. Percuma dilakukan penurunan suku bunga bila perbankan nasional maupun dunia usaha atau ketika kondisi inflasi dan ekonomi nasional tidak merespons dengan baik.

Sikap hati-hati itu sering kali menjadi sumber ketidakpuasan terhadap BI. Otoritas moneter dianggap lambat, ketinggalan, kurang memahami dunia usaha dan seterusnya. Ketidaksukaan itu merebak akhir-akhir ini.

Banyak pihak menyebut inilah risiko memberikan independensi kepada otoritas moneter. BI jadi bertindak menurut pandangan sendiri, tidak mau keluar dari jalur konvensional atau konservatif.

Dengan merebaknya ketidaksukaan itu, muncul pertanyaan apakah keputusan BI tersebut memang benar-benar didasarkan kepada situasi domestik dan internasional atau karena desakan pihak luar?

Kita percaya sekalipun independen, Kebon Sirih dan Lapangan Banteng masih melakukan koordinasi. Bukankah penurunan suku bunga itu selang sehari setelah satu hari Menteri Keuangan/Menteri Perekonomian menerbitkan kebijaksanaan baru.

Kini harapan berbagai pihak menjadi kenyataan. BI rate diturunkan 0,5% dan kalangan perbankan nasional maupun swasta tergantung kepada struktur keuangan masing-masing akan memberi tanggapan dalam satu bulan mendatang. Suku bunga kredit akan turun.

Dalam kaitan ini, kita berharap perbankan harus jujur dalam menjalankan fungsinya. Perbankan hendaknya juga menurunkan tingkat suku bunga untuk kartu kredit, pinjaman personal termasuk pembelian sepeda motor, membayar dana pendidikan dan lain-lain. Hal ini perlu diutarakan sebab perbankan tak pernah mau menurunkan suku bunga untuk jenis-jenis kredit seperti itu.

Kita membayangkan, kalau perbankan mau melakukannya maka kondisi daya beli masyarakat akan tertolong. Bukankah pemerintah juga telah menurunkan harga BBM dan masih

akan terus melakukannya? Kombinasi antara penurunan suku bunga dan harga BBM akan berdampak positif.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebijaksanaan pemerintah menyediakan stimulus Rp 50 triliun dan penurunan suku bunga akan merangsang perekonomian domestik. Industri akan tertolong, pendapatan dan daya beli masyarakat terpelihara. Atas dasar itu, dampak krisis global dapat diminimalkan.

Bila sektor fiskal dan moneter sudah bergerak serta memengaruhi sektor riil maka kita berharap para elite yang memimpin bidang-bidang lain turut memberi kontribusi. Hal ini dikemukakan sebab selama ini seperti telah dibuat sekat-sekat yang lebih banyak bermakna tidak mau tahu atau tak ada koordinasi.

Iklm yang kondusif pada sektor-sektor politik, sosial dan keamanan perlu dibangun sebab hal tersebut turut memengaruhi. Bidang pariwisata, misalnya, akan terganggu bila pilkada berakhir rusuh. Dampaknya akan memengaruhi industri kecil yang menghimpun ratusan ribu orang.

Secara teknis, kita siap menghadapi krisis, tetapi unsur mental dan kebersamaan, serta kepekaan terhadap krisis masih perlu dibenahi. (Sinar Harapan)

Jakarta, 9 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu